

Strategi Inovasi Pembangunan Melalui Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup

Dimas Pahlawanita Damayanti¹ ; Zulkarnain²

Pendidikan Luar Sekolah/ Fakultas Ilmu Pendidikan/ Universitas Negeri Malang

*) dimaspahlawanitadamayanti@gmail.com

Abstrak

Konsep pembangunan mengalami perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, proses peningkatan pembangunan ditekankan pada upaya pemberantasan kemiskinan sebagai isu utama. Salah satu upayanya adalah dengan mengatasi berbagai persoalan berkaitan dengan pendidikan dan melakukan memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau kepada masyarakat miskin sebagai prioritas pembangunan. PKBM hadir untuk menjawab tantangan tenaga kerja potensial yang besar yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang mereka inginkan. Ada juga karyawan yang membutuhkan keterampilan baru saat berganti pekerjaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendidikan ekstrakurikuler berupa program pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh PKBM. PKBM dapat menjadi penyelenggara utama program pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, karena proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM dimaksudkan untuk menyenangkan dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan belajar. Program layanan PLS didasarkan pada keinginan dan kebutuhan warga belajar, oleh karena itu pengelola program harus kreatif dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan. PKBM selalu diharapkan tanggap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan SDGs.

Kata kunci: pembangunan, PKBM, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2022 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,54%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan bulan September 2021 yang mencapai 9,71%.

Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam situasi kemiskinan di Indonesia, yang merupakan yang terendah sejak pandemi Covid-19 melanda.

Pada bulan Maret 2020, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,78%. Namun, pada bulan September 2020 dan Maret 2021, angka ini terus meningkat menjadi 10,19% dan 10,14%. Walaupun angka di atas menggambarkan sebuah penurunan, tetapi secara akumulasi angka kenaikannya belum bisa menyamai bahkan meningkat sebagaimana sebelum covid-19.

Data tersebut menunjukkan bahwa terkadang pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sejalan dengan tujuan pemerataan ekonomi. Malahan, seringkali pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Konsep *trickle-down effect* pada awalnya dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kesenjangan, tetapi kenyataannya hanya sebagian kecil dari warga negara yang benar-benar dapat menikmati hasil pembangunan yang berhasil dicapai.

Pembangunan yang terus terjadi justru tidak mengubah taraf kehidupan masyarakat, artinya mayoritas masyarakat justru berada dalam jurang kemiskinan yang signifikan. Hal ini mendorong munculnya konsep pembangunan yang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat asasi (dasar), seperti perekonomian, kesehatan, dan pendidikan.

Pada perkembangannya, konsep pembangunan mengalami perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, proses peningkatan pembangunan ditekankan pada upaya pemberantasan kemiskinan sebagai isu utama. Salah satu upayanya adalah dengan mengatasi berbagai persoalan berkaitan dengan pendidikan dan melakukan memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau kepada masyarakat miskin sebagai prioritas pembangunan. Pentingnya pembangunan tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang terdiri dari tiga dimensi ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan pembangunan tersebut dapat dilihat dari berbagai program layanan pendidikan luar sekolah (PLS) yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga/organisasi pendidikan di Indonesia. Program-program ini memberikan ide-ide baru yang

penting yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu, program PLS yang ada idealnya didasarkan pada tiga jenis program, yaitu program informasi (penyuluhan), program kelembagaan (kursus dan/atau pelatihan) dan program pengembangan (penyuluhan dan/atau dukungan). Tiga program dapat membantu memecahkan berbagai masalah di masyarakat.

Program kelembagaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat untuk mengimplementasikan ide-ide inovatif baru melalui penyelenggaraan program kursus atau pelatihan. Tujuan dari program informasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerima informasi sehingga mereka memahami pentingnya menerima ide-ide pembangunan inovatif yang ditawarkan. Program pengembangan diperlukan ketika orang membutuhkan bantuan atau bimbingan untuk menerapkan ide-ide inovatif tersebut. Dengan demikian, konsep tersebut menekankan bahwa ketiga jenis program PLS tersebut sangat penting untuk mendukung keberhasilan difusi inovasi pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan diartikan sebagai suatu upaya yang disengaja oleh suatu negara, bangsa, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui perubahan yang terencana untuk menuju masyarakat modern dan berkembang. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai tujuan nasional tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Salah satu visi Pemerintah Indonesia adalah untuk menciptakan inovasi pembangunan melalui peningkatan sumber daya manusia.

Konsep penguatan sumber daya manusia didasarkan pada peningkatan kapasitas produksi dan konsumsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan per penduduk merupakan faktor penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat. Oleh karena itu daya beli masyarakat dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan. Program pembangunan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Di bidang pendidikan, pembangunan

fasilitas seperti sekolah, balai latihan dan universitas bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi fokus pada beberapa aspek, antara lain: (1) meningkatkan produktivitas dalam produksi barang dan jasa; (2) meningkatkan investasi; (3) memperluas peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja; (4) mengurangi tingkat pengangguran; (5) menciptakan dan menyebarkan inovasi; (6) mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (7) meningkatkan daya saing. Ketujuh aspek tersebut membutuhkan pengembangan SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan melalui pendidikan.

Peningkatan mutu SDM menjadi fokus utama pendidikan dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kepribadian manusia agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan formal dan nonformal menjadi pendekatan yang dapat dilakukan. PKBM mempunyai dua program utama dalam pendidikan nonformal yaitu pengembangan tenaga kerja dan inovasi. Terdapat dua program utama dalam pengembangan sumber daya manusia, yaitu Program Peningkatan Pendapatan yang menitikberatkan pada pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan Program Pelatihan Kecakapan Hidup yang menitikberatkan pada peran tenaga kerja.

PKBM hadir untuk menjawab tantangan tenaga kerja potensial yang besar yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang mereka inginkan. Ada juga karyawan yang membutuhkan keterampilan baru saat berganti pekerjaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendidikan ekstrakurikuler berupa program pelatihan vokasional yang diselenggarakan oleh PKBM.

Oleh karena itu, PKBM harus bekerjasama dengan beberapa lembaga lain seperti program studi, pusat magang dan lembaga pendidikan negeri. Program-program tersebut dapat dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat pendidikan yang dibutuhkan, atau dengan mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan di PKBM.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, PKBM merencanakan “pusat layanan pendidikan” yang akan menawarkan berbagai program pembelajaran terkait keterampilan

dunia kerja. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari berbagai kategori warga belajar. Terdapat tiga hal utama yang dilakukan oleh PKBM dalam membantu pemerintah dalam mencapai target SDGs, diantaranya;

1. Pelatihan untuk Kalangan Pekerja

Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang mencakup perolehan keterampilan, pengetahuan, aturan, atau sikap yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja seseorang dalam pekerjaannya. Definisi pelatihan kerja menurut Pasal I Ayat 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan tersebut lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia organisasi berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu bersangkutan saat ini (current job oriented). Tujuan yang ingin dicapai dengan program pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja individu pada posisi atau tugas saat ini.

Tujuan pelatihan sebenarnya terdiri dari dua aspek, yaitu partisipasi individu dan perbaikan organisasi. Pelatihan diharapkan dapat mempengaruhi perilaku individu sebagai anggota organisasi, dan pada saat yang sama, memperbaiki efektivitas organisasi itu sendiri. Apabila pelatihan diberikan kepada karyawan suatu perusahaan atau pabrik, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan individu tersebut sehingga menjadi lebih produktif. Sementara pada pelatihan kader organisasi, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan kader sehingga organisasi dapat lebih efektif dalam menjalankan program dan mencapai tujuan.

Adapun proses pelatihan sebagaimana dalam gambar berikut:



Gambar 1. Alur proses pelatihan

Pada akhirnya, proses pelatihan bertujuan untuk dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan, di mana keberhasilan pelatihan akan dinilai berdasarkan ketercapaian berbagai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menjadi arahan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelatihan, terutama pelatih dan peserta pelatihan, untuk merancang kegiatan yang tepat guna dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, tujuan pelatihan juga menjadi acuan dalam merancang kurikulum pelatihan, seperti pemilihan materi, teknik, media, dan evaluasi, sehingga dapat memastikan standar dan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan.

Keberadaan PKBM sangat membantu dalam memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada para pekerja yang terbelang masih memiliki kinerja di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja. Maka perlu adanya pengembangan berupa pelatihan berbasis on the job training. Misal pelatihan dan pendampingan kepada para pekerja di bidang pertanian untuk melakukan studi banding ke kawasan pertanian atau perkebunan yang dianggap menghasilkan hasil panen yang baik.

2. Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat

Masih atau tidaknya inovasi kepada masyarakat sangat bergantung proses pendidikan. Maka, PKBM harus penyebaran

gagasan inovasi kepada masyarakat melalui program pendidikan yang tepat. Langkah awal adalah menentukan kelompok sasaran yang sesuai. Setelah itu, perlu dibangun minat dan ketertarikan dalam diri peserta.

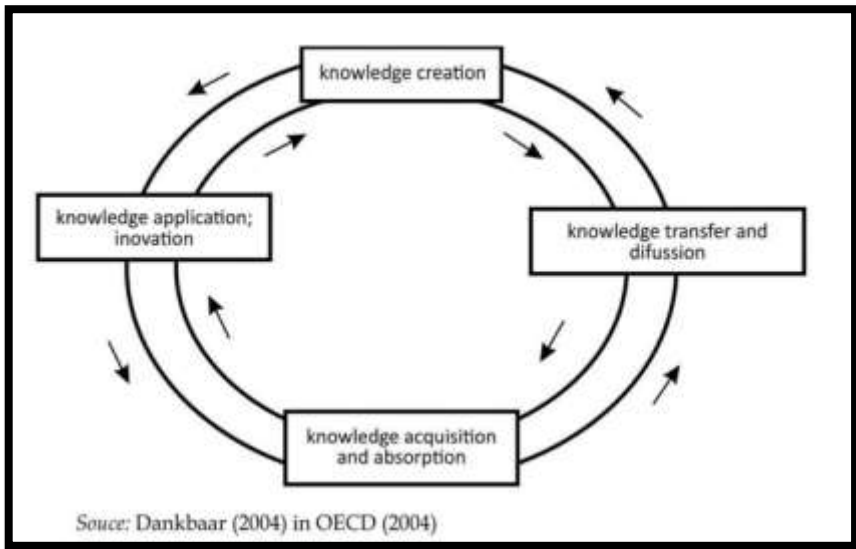
Langkah selanjutnya adalah membangkitkan minat, membangun kesadaran, menguji, memperkuat keyakinan tentang kebermanfaatan inovasi baru, hingga akhirnya ide tersebut diimplementasikan. Semua proses inovasi ini membutuhkan orang-orang yang terlibat untuk belajar. Adopsi inovasi pada hakekatnya merupakan hasil dari proses pelatihan yang panjang dan berkesinambungan. Proses ini mengubah keyakinan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan perilaku.

Dalam penyebaran inovasi teknologi informasi dan komunikasi terkait media sosial serta pemanfaatannya untuk masyarakat, diperlukan berbagai program pembelajaran mulai dari pelatihan komputer hingga penyuluhan kesadaran media. Keseluruhan program tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar masyarakat sasaran (warga belajar) PKBM benar-benar dapat menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO telah melakukan riset di beberapa negara di Asia-Pasifik untuk mengidentifikasi praktik yang baik dalam pendidikan nonformal. Studi ini memberikan tujuh strategi utama untuk inovasi masa depan dalam pendidikan informal. Pertama, definisi dan ruang lingkup pendidikan nonformal harus diperluas. Kedua, keterlibatan masyarakat penting untuk keberhasilan pendidikan non formal. Ketiga, pendidikan nonformal harus berorientasi pada kebutuhan lokal. Keempat, dukungan pemerintah harus berkelanjutan. Kelima, literasi harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Keenam, pendidikan dasar dapat membantu mengatasi kemiskinan. Terakhir, pendidikan nonformal harus menyentuh berbagai sektor.

Tidak hanya itu, OECD telah merekomendasikan beberapa teori tentang bagaimana inovasi terjadi, termasuk teori lingkaran, teori empat tahap, model mata rantai dan model siklus inovasi kesehatan. Teori sirkular yang dikembangkan oleh Dankbaar menganggap sains dan teknologi penting, tetapi tidak cukup, karena sumber pengetahuan terpenting adalah inovasi. Model ini

menjelaskan bagaimana informasi bergerak menuju arah atau tujuan tertentu dan mencoba untuk menggambarkan hubungan dinamis ini. Model inovatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Inovatif

Pernyataan ini memperjelas bahwa pengetahuan harus diciptakan, ditransmisikan dan disebarluaskan. Pengetahuan harus terus-menerus dan terus menerus dimiliki, diasimilasi dan diterapkan, atau sebaliknya. Penciptaan pengetahuan harus disertai dengan inovasi dan aplikasi terus menerus, serta transfer dan diseminasi. Proses kreatif, kemampuan mentransmisikan dan menyebarluaskan, menyerap dan memiliki, serta kemampuan berinovasi membutuhkan pengetahuan tentang keberadaan, status dan peran pengetahuan, baik tunggal maupun multidisiplin.

3. Orientasi Kesejahteraan Hidup

Program PLS, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tertinggal, menjadi sangat penting, baik bagi mereka yang tertinggal secara mutlak maupun relatif. Seperti yang diusulkan oleh Chambers, program ini bertujuan untuk “putting the last first”.

Program PLS harus berfokus pada masyarakat yang tertinggal, baik secara absolut maupun relatif, agar dapat menerima layanan program pembelajaran. Dalam hal ini, masyarakat perlu didorong untuk belajar agar bisa keluar dari kondisi kebodohan dan ketertinggalan.

Program PLS memiliki fokus utama pada masyarakat yang mengalami ketertinggalan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat yang terperangkap dalam situasi ketertinggalan akibat kekurangan modal menghadapi kondisi yang sangat sulit. Kondisi ini berdampak pada produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah, dan kemampuan menabung yang rendah. Hal ini pada akhirnya memengaruhi buruknya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Program pembelajaran PLS dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketertinggalan masyarakat, dengan fokus pada kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, PKBM harus menyelenggarakan program pendidikan dasar yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik masyarakat tertinggal. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah pemberantasan buta aksara atau program keaksaraan, yang terdiri dari program keaksaraan dasar dan fungsional.

Filosofi program keaksaraan adalah untuk membebaskan masyarakat dari kebutaan pengetahuan dasar, sehingga mereka dapat belajar mengenai situasi nyata dalam kehidupan mereka dan memiliki banyak pilihan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Program kecakapan hidup dianggap sangat penting karena tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman mengenai potensi diri sendiri dan peran sosial yang harus dijalankan dalam hidup, baik sebagai pekerja, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, kecakapan hidup yang dikuasai juga membantu masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai sumber dan kendala yang ada di lingkungan mereka. Diharapkan, masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membebaskan diri dari kondisi ketertinggalan. Program keaksaraan yang diterapkan oleh PKBM memiliki paradigma yang berbeda dari sebelumnya, dimana tidak hanya menganggap keaksaraan sebagai keterampilan teknis semata, melainkan juga sebagai suatu praktik

sosial yang relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran keaksaraan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca teks tertentu, namun juga membantu masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya secara lebih luas.

PKBM diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh Sihombing, PKBM merupakan salah satu opsi yang bisa diambil untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Pendekatan budaya yang persuasif dapat digunakan untuk menggali, menumbuhkan, memanfaatkan, dan memperdagunakan potensi-potensi yang belum tergali sebelumnya. Dengan demikian, PKBM dapat berperan sebagai tulang punggung dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, PKBM bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang dapat membantu masyarakat belajar dan meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan inovasi dalam mencari informasi baru. PKBM didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan nilai swadaya, gotong royong, dan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan mereka.

SIMPULAN

PKBM dapat menjadi penyelenggara utama program pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, karena proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh PKBM dimaksudkan untuk menyenangkan dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan belajar. Program layanan PLS didasarkan pada keinginan dan kebutuhan warga belajar, oleh karena itu pengelola program harus kreatif dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan. PKBM selalu diharapkan tanggap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Lestari. "Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan desentralisasi di Indonesia." *Kinerja*, Vol. 20, No. 1 (2016).
- Alpin Syahrir, M, dkk. "Pengaruh Pelatihan Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Rumah Batik Azmiah Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi." *Science of Management and Students Research Journal (SMS)*, Vol. 1, No. 1 (2022).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025." Retrieved Maret 23 (2004).
- Chambers, Robert. *Putting The Last First*. (Routledge, 1986).
- Dougherty, Deborah. "Organizing Practices In Services: Capturing Practice-Based Knowledge For Innovation." *Strategic Organization*, Vol. 2, No. 1 (2004).
- Eko Supatmi, Mamik, dkk. "Pengaruh Pelatihan, Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Dan Kinerja Karyawan." *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No. 1 (2013).
- Hasan, Muhammad & Muhammad Azis. "Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal." (2018).
- Hendradewi, Savitri, dkk. "Kualitas Produk Tradisional Sulam Tapis Mampu Memberikan Kesejahteraan Masyarakat Di PKBM Permata Metro Lampung." *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 27, No. 3 (2022).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi> (Diakses pada 04 Desember 2022)
- Huraerah, Abu. "Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat: Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. *Humaniora*, (2008).
- Ibrahim, Aceng, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin." *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018).

- Igirisa, Irawaty. "Studi Implementasi Kebijakan Pnpm Mandiri Perdesaan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaen Gorontalo." *Jurnal Manajemen*, Vol. 17, No. 02 (2013)
- Nazar, Asrul. "Pemberdayaan Perempuan di PKBM Bungaeja Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Melalui Program Keaksaraan Usaha Mandiri." *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 3 (2020).
- Pamungkas, Alim Harun, dkk. "Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs." *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Vol. 6, No. 3 (2018).
- Retno Dumilah, Ani, & Ety Rahayu. "Program Pendidikan Kecakapan Hidup (Lifeskills) sebagai Strategi Intervensi dalam Perspektif Pembangunan Sosial di Indonesia." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, Vol. 5, No. 2 (2020).